

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama pelaksanaan proyek bangunan yang berlarut-larut. SDGs memuat 17 tujuan yang dirinci dalam 169 target dan 241 indikator yang selalu sesuai konteks. SDGs memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya yang harus dipenuhi agar berhasil dan diakui sebagai program yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Murniningtyas dan Alisjahbana, 2018).

Pilar-pilar tersebut adalah pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati.(Challenge & Countries, 2015) No Poverty (menghapus kemiskinan) adalah tujuan pertama yang ingin dicapai dan dipromosikan oleh SDGs. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Isu kemiskinan di atas berpotensi menimbulkan isu lain, Studi tentang kemiskinan sering disebut sebagai “studi abadi” yang gigih dan memberikan solusi.

Karena dapat menimbulkan hubungan sosial baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan merupakan masalah yang signifikan bagi bangsa Indonesia dan tantangan yang signifikan bagi semua pemerintah Menurut Ishartono dan Raharjo (2015), Indonesia berdedikasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan saat ini sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). selama perkembangan.

17 tujuan utama SDG diwakili oleh 169 pernyataan target dan 241 indikator yang saat ini disinkronkan. pencapaian SDGs sebagai rencana yang dapat menjamin kesejahteraan bagi semua. Contohnya dapat dilihat pada tiga tempat berikut: 1) Pilar sosial yang menjadi tulang punggung masyarakat 2. Kondisi perekonomian saat ini. 3. Aspek dasar ekosistem, seperti keanekaragaman hayati (Challenge & Countries, 2015).

Masalah kemiskinan dunia tampaknya menjadi masalah yang menDesak dan kemungkinan akan bertahan untuk beberapa waktu. Indonesia memiliki sejumlah tujuan pembangunan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program pembangunan SDGs global dan mencapai tujuan SDGs. Dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan yang paling mendasar, semua provinsi di Indonesia secara otomatis diatur oleh keputusan presiden.

Pelaksanaan Perpres No. 59 tentang Pembangunan Berkelanjutan agar tema-tema yang selama ini dibicarakan di berbagai daerah, perkotaan dan perDesaan, dapat diturunkan semaksimal mungkin yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. tidak diragukan lagi, keputusan presiden. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian tujuan untuk pembangunan dunia yang sedang diupayakan dan disumbangkan oleh Indonesia.

Seluruh provinsi di Indonesia secara otomatis wajib mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada saat diundangkan, guna memperkecil kesenjangan yang ada antar berbagai provinsi, kota, dan perDesaan agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya, pada tabel jumlah penduduk miskin di Jawa Barat untuk presentase penduduk miskin di Jawa Barat berdasarkan pada presentase sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah penduduk miskin Di Jawa Barat Tahun 2020-2022

Wilayah	Presentase penduduk miskin (persen)		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	7,88	8,40	8,06

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Peningkatan persentase penduduk miskin selama periode 2020-2022 tersebut, di tahun 2020 menjadi 7,88 persen. Dan mengalami penurunan hingga 40 poin tingkat penduduk miskin di tahun 2021 yaitu 8,40 persen sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali persentase penduduk miskin yaitu 06 poin menjadi 8,06 persen. Persentase penduduk miskin di setiap tahunnya selalu adanya penurunan yang terjadi.

Di Jawa Barat, berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan Pemerintah provinsi menyesuaikan tindakan strategisnya dengan RPJMN yang dibuat oleh pemerintah federal dengan pandangan ke tahun 2030 ke depan. Sesuai dengan Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Kerjasama Regional, SDGs sudah mulai diimplementasikan di Jawa Barat melalui sejumlah inisiatif pembangunan yang dikaitkan dengan indikatornya.

Disparitas pada tinggi antara perkotaan dan perDesaan merupakan salah satu ciri kemiskinan di Indonesia. di mana kemiskinan lebih banyak terjadi di peDesaan daripada di perkotaan. Tahun 2020 menjadi saksi peluncuran program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah peDesaan.

Inisiatif ini diharapkan menjadi program utama pada penggunaan uang Desa pada tahun 2021 dalam rangka untuk dilakukannya dana dari Desa untuk mengurangi jumlah kekeruhan yang terjadi di Desa. Program SDGs Desa diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Tujuannya agar berhasil. SDGs untuk PerDesaan ditopang oleh dua prinsip utama: (1) Dana Desa harus dibagi oleh semua masyarakat Desa, terutama yang berada di daerah terpencil; dan (2) standar pembangunan Desa harus dipenuhi melalui pembangunan Desa yang lebih diakui.

Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah yang terkenal dengan Kawasan industrinya. Adanya Kawasan industry di Kabupaten Bekasi ini tidak hanya menjamin dengan keadaan setiap kesejahteraan masyarakatnya, karena permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bekasi ini termasuk factor utama dalam kehidupan masyarakatnya yang masi mengalami kemiskinan yang men-

jadi persoalan serius sejak lama, karena untuk persoalan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Masyarakat yang mencari pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk miskin Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020- 2022

Wilayah Jawa Barat	penduduk miskin pada capaian kinerja makro		
	Capaian kinerja tahun 2020	Capaian kinerja tahun 2021	Capaian kinerja tahun 2022
Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01

Sumber: bekasikab.go.id

Secara tidak langsung kemiskinan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan, menggambarkan kurang berhasilnya pemerataan kesejahteraan antara masyarakat di wilayah tersebut. Selama periode 2020 - 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi meningkat cukup tajam akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan persentase penduduk miskin selama periode 2020 - 2021 tersebut menjadi 4,82 persen di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,39 persen di banding dari tahun 2020 menjadi sebesar 5,21 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin di periode 2022 adalah sebesar 0,1 persen dari poin 0,39 di tahun 2021.

Peningkatan persentase penduduk miskin selama periode 2020 – 2021, mengalami penurunan dari 0,39 persen menjadi 0,2 persen. Persentase penduduk miskin menjadi 5,01 Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan antara penduduk miskin di Kabupaten Bekasi. Selama periode 2019 - 2020, Indeks kedala-

man kemiskinan Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan, dari 0,60 menjadi 0,72.

Kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Bekasi tidak terlalu jauh, namun memiliki kecenderungan meningkat di tahun 2020.

Kecamatan Karang Bahagia adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Karang Bahagia adalah hasil pemekaraan dari Kecamatan Cikarang (sekarang Cikarang Utara). Berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya di utara, Kecamatan Pebayuran dan Kedungwaringin di timur, Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Utara di Selatan, Kecamatan Sukatani di barat. Untuk jumlah penduduk miskin di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penduduk miskin Kecamatan Karang Bahagia Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Pada Tabel Diatas, Kecamatan Karang Bahagia yang berpenduduk 18.954 warga miskin. Dengan jumlah penduduk 129.888 jiwa, Kecamatan Karang Bahagia terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan jumlah sampah yang ada saat ini. Dengan jumlah penduduk 129.888 jiwa, Kecamatan Karang Bahagia terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di setiap Desa yang berada di kecamatan karang Bahagia.

Jumlah Desa Sekecamatan Karang Bahagia terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Sukaraya, Desa Karang Rahayu, Desa Karangsetia, Desa Karangsatu, Desa Karangmukti, Desa Karanganyar, Desa Karang Bahagia, Desa Ka-

rangsantosa Pemerintah Kabupaten Bekasi menawarkan tiga jenis bantuan untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan: Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah tiga jenis bantuan yang berbeda.

Rasa aman mereka dengan meningkatkannya. Terlepas dari pekerjaan mereka yang melelahkan, orang sekarang memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. meningkatkan kesejahteraan mereka. Beban hidup orang-orang telah meningkat seiring berjalannya waktu.

Untuk Desa karanganyar jumlah penduduk setiap tahunnya selalu ada ada peningkatan yang terjadi, akan tetapi untuk jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang terjadi oleh karena itu dengan adanya program Sustainable Development Goals ini dapat mengatasi kemiskinan di Desa Karanganyar, program sustainable Development Goals ini dilaksanakan pada tahun 2020 diakhir tahun.

Tabel 3.1
Jumlah penduduk Miskin Di Desa Karanganyar Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk miskin	Presentase
2020	11001	633	32,84 %
2021	11202	501	33,03 %
2022	11638	455	34,03 %

Sumber: Desa Karanganyar

Dapat dilihat pada tabel diatas, keseluruhan penduduk miskin di Desa Karanganyar pada tahun 2020 jumlah penduduk 11001 dan untuk jumlah penduduk miskin di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan presentase yaitu 32,84%, penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 11202 untuk presentase jumlah penduduk miskin 33,03 %, oleh karena itu keseluruhan penduduk miskin setiap tahun adanya penurunan. sedangkan pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk Desa Karanganyar 11638 orang dan untuk jumlah presentase penduduk miskin yaitu 34,03 %.

Jumlah penduduk yang meningkat akan tetapi tidak untuk jumlah penduduk miskin yang terjadi, karena Desa Karanganyar mempunyai program mandiri untuk masyarakat di Desa Karanganyar adapun programnya santuan kematian untuk meringankan beban keluarga karena kehilangan orang yang mereka sayangi dengan adanya program tersebut Desa Karanganyar dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Di Desa Karanganyar yang masih ada beberapa kategori penduduk miskin Oleh karena itu, Desa Karanganyar terus meningkat Program-program mandiri yang di berikan untuk masyarakat di Desa Karanganyar untuk mengatasi kemiskinan yang meningkat. terjadinya peningkatan di tahun 2022 karena adanya pendatang yang begitu banyak. Oleh sebab itu, angka kemiskinan mengalami peningkatan. Program pemerintah dan program Desa Karanganyar tersebut diharapkan dapat mengatasi kemiskinan.

Desa Karanganyar, RT/RW, dan setiap kepala keluarga, termasuk yang ikut serta dalam program pembangunan nasional, dapat sepenuhnya melaksanakan SDGs. Pemerintah Desa Karanganyar dan BPD bersama-sama menyiapkan dokumen RAD yang menguraikan implementasi dan komitmen tingkat Desa untuk melaporkan SDGs. Proses ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

Rencana Aksi Desa Karanganyar adalah program untuk melakukan lompatan cepat menghapus puing-puing di SDGs Desa dengan semua entitas terkait. Program ini harus memungkinkan jejaring sosial menyebar dengan cepat dan efisien.

Tabel 4.1

Analisisa hasil 18 Sustainable Development Goals Desa Karanganyar

ANALISISA HASIL 18 <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> DESA KARANGANYAR	
1. Desa tanpa kemiskinan (33,85) Kategori (maju)	dapat nilai bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Karanganyar sudah baik
2. Desa tanpa kelaparan (33,33) Kategori (tertinggal)	Dapat dinilai bahwa angka kelaparan di Desa Karanganyar sangat baik karena masyarakat nya mayoritas petani dll
3. Desa sehat dan sejahtera (54,24) Kategori (berkembang)	dapat dinilai bahwa baik karena kesehatan di Karanganyar menjalani hidup sehat dan bersih dan untuk kesehatannya sendiri setiap beberapa bulan diadakan posyadu yang dilakukan oleh bidan Desa Karanganyar untuk anak balita untuk sejahtera di Karanganyar sudah cukup baik
4. Pendidikan Desa berkualitas (11,46) Kategori (tertinggal)	karena mempunyai PAUD Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Pesantren
5. Keterlibatan perempuan Desa (33,33) Kategori (tertinggal)	dapat nilai sangat baik karena kepala Desa dan BPD di pimpin oleh perempuan. https://sid.kemenDesa.go.id

ANALISIS HASIL 18 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DESA KARANGANYAR

6. Desa layak air bersih dan sanitasi (71,41) Kategori (maju)	dinilai cukup baik karena sudah ada program pasimas
7. Desa bersinergi bersih dan terba- rukan (99,55) Kategori (mandiri)	ini sangat baik dan meningkat di se- tiap tahunnya
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata (22,52) Kategori (berkembang)	sangat baik karena tumbuh dengan merata di setiap wilayah
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai dengan kebutuhan (98,70) Kategori (mandiri)	dinilai sangat baik karena setiap ta- hunnya mendapatkan anggaran dibidang infrastruktur dan inovasi Desa
10. Desa tanpa kesenjangan (59,53) Kategori (berkembang)	dinilai sangat baik
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman (46,90) Kategori (mandiri)	Karena ada pos ronda di setiap RT
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan (14,29) Kategori (tertinggal)	dinilai sangat baik karena ada ke- rajinan yang mendaur ulang dari ba- rang bekas menjadi barang yang dihasilkan dengan sangat menarik
13. Desa tanggap perubahan iklim (0,00) Kategori (tertinggal)	Di Desa Karanganyar bahwa tidak adanya Desa tanggap perubhan ikli

ANALISIS HASIL 18 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA KARANGANYAR	
	yang terjadi.
14. Desa peduli lingkungan laut (0,00) Kategori (tertinggal)	Di Desa Karanganyar mayoritas masyarakat sebagai petani dan untuk peduli lingkungan laut di Desa Karanganyar tidak ada.
15. Desa peduli lingkungan darat (14,29) Kategori (tertinggal)	dinilai sangat baik karena mempunyai 1.5 Ha dan sawah 318.5 Ha
16. Desa damai berkeadilan (83,97) Kategori (mandiri)	Sangat baik karena masyarakatnya saling membantu satu sama lain
17. Kemitraan untuk pembangunan Desa (00,0) Kategori (tertinggal)	Untuk kemitraan untuk pembangunan di Desa Karanganyar tidak ada.
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif (24,65) Kategori (berkembang)	Untuk kelembagaan desa dinamis dan budaya Desa adaptif dapat dikatakan berkembang.

Sumber : <http://sid.kemendes.go.id/>

Tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tidak hanya berada pada pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat juga diharuskan untuk mengambil peran dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci kesuksesan penanggulangan kemiskinan yang terjadi.

Kerjasama adalah keniscayaan demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian terdahulu mengenai SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Saudari Ayu Oktaviani Musri (2020) dengan judul penelitian "Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan.

Temuan yang didapatkan adalah bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi adalah mengacu kepada program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinilai berhasil oleh para peserta karena mampu menyesuaikan tingkat kemiskinan sekitar 18.461 KK. Namun masih ada beberapa prosedur yang dimainkan selama eksekusi.

Tabel 4.2

Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Pemerintah tahun 2021

PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	%
Penerima BLT Desa Desa	136 <i>keluarga</i>	34,43%
Penerima program keluarga harapan	0 <i>keluarga</i>	0,00 %
Penerima bantuan sosial tunai	0 <i>keluarga</i>	0,00 %
Penerima bantuan presiden/Banpres	16 <i>keluarga</i>	4,05 %
Penerima bantuan UMKM	81 <i>keluarga</i>	20,51%
Penerima bantuan untuk pekerja	7 <i>keluarga</i>	1,77 %
Penerima bantuan pendidikan anak	35 <i>keluarga</i>	8,86 %
Penerima bantuan lainnya	120 <i>keluarga</i>	30,38 %
TOTAL PENERIMA BANTUAN SOSIAL	395 <i>keluarga</i>	100%

Sumber : <http://sid.kemendes.go.id/>

Dapat dilihat dari tabel di atas, pemerintah Desa dengan adanya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kemiskinan pengentasan di wilayah Desa Karanganyar. PDT dan Transmigrasi termasuk di antara 136 kelompok kepala keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Desa Kementerian Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di wilayah Desa Karanganyar sangat sedikit, dengan 5,50% jumlah penduduk yang ada 11001 ditahun 2020 dari beberapa bantuan diatas yang tidak ada penrimannya adalah jenis bantuan program keluarga harapan dan bantuan sosial tunai. Penerima bantuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berjumlah 81 keluarga, penerima bantuan untuk pekerja berjumlah 7 keluarga.

Penerima bantuan pendidikan anak berjumlah 35 keluarga, penerima bantuan lainnya berjumlah 120 keluarga dapat dilihat bahwa penerima bantuan yang berjumlah sangat banyak terdapat pada penerima bantuan lainnya, karena di Desa Karanganyar mempunyai program-program lainnya yang bukan dari program pemerintah. Total penerima bantuan semuanya berjumlah 395 keluarga.

Perkembangan Desa Karanganyar akhir-akhir ini terlihat cukup aman untuk mempertahankan statusnya sebagai Desa yang maju dapat dilihat dari kementerian Desa yaitu 39,00 yang dikatakan Desa maju. Hal ini semakin menunjukkan keberhasilan keputusan Desa untuk mendanai pembangunan sosial dan ekonomi semata-mata dengan sumber dayanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) telah berhasil dalam mengurangi kemiskinan di Desa Karanganyar.

Berdasarkan gambaran bagaimana dipraktikkan di Desa tersebut sebuah wilayah di Kabupaten Bekasi Jawa Barat bernama Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia. Pada “Program Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Karanganyar Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi” peneliti tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan kajian.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Karanganyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. MengAnalisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Karanganyar
2. MengAnalisis Tingkat keberhasilan program *Sustainable development Goals* (SDGs) untuk mengatasi kemiskinan di Desa Karanganyar

1.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

1.5 Signifikasi Akademik

Signifikasi peneliti berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.5.1 signifikan Akademik

Berdasarkan pengamatan penelitian selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan diambil tentang “Implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGS) dalam mengatasi kemiskinan di Desa Karanganyar Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut antara lain:

Sementara itu menurut Muhammad Fardan (2015) pemerintah sudah mulai serius dalam menanggapi isu kemiskinan dalam kerangka SDGs. Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005- 2025 terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia mulai memasukkan beberapa program terkait dengan kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global yang bertujuan.

Untuk melaksanakan pembangunan dengan skala global. Lebih jauh dijelaskan oleh (Ansori, 2018) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa terdapat kesamaan maupun kemiripan antara poin-pont dalam SDGs dan juga Nawacita dalam hal pembangunan ekonomi, manusia, ekologi dan konservasi. Oleh karena itu, kedua konsep ataupun pendekatan tersebut dapat diselaraskan. Didalam tujuannya penghapusan kemiskinan menjadi tujuan pertama.

Dari tujuan tersebut juga dapat dilihat bahwa negara didunia sepakat bahwa kemiskinan harus dihapuskan (Raharjo, 2015). Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo, 2015) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan tujuan lain yang dicanangkan oleh SDGs. Tujuan selanjutnya seperti dunia tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan serta tujuan yang lain akan dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya dikurangi.

Konsep dalam SDGs sangat diperlukan guna membentuk kerangka pembangunan yang dapat mengakomodasi segala perubahan pasda ditetapkannya era MDGs terutama terfokus mengenai perubahan situasi dunia sejak era 2000-an (Bisnis et al., 2017). Konsep pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagan, ekonomi, lingkungan dan juga dimensi sosial.

Didalam tujuannya maka SDGs terdapat 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk pengukurannya (Pratama et al., 2020). Konsep dalam SDGs sangat diperlukan guna membentuk kerangka pembangunan yang dapat mengakomodasi segala perubahan pasda ditetapkannya era MDGs terutama terfokus mengenai perubahan situasi dunia sejak era 2000an (SDGS, 2022).

Konsep pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan beberapa dimensi diantaranya merupakan dimensi kelembagaan, ekonomi, lingkungan dan juga dimensi sosial. Didalam tujuannya maka SDGs terdapat 17 tujuan dan sejumlah indikator untuk pengukurannya (Pratama et al., 2020). Lebih jauh dalam penelitiannya (Krisandriyana et al., 2019) menjelaskan bahwa isu mengenai sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan juga kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi penerapan SDGs.

1.5.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar salah satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas “45” Bekasi tentang "Implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Desa Karanganyar Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi ".

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang memberikan wawasan baru terutama bagi masyarakat. Selain itu, bagi pemerintah Desa, kajian ini dapat menjadikan bahan masukan untuk kemajuan dan perbaikan khususnya dalam penyusunan Desa Karanganyar Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. Bab I, berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian serta signifikan akademik dan signifikan praktis.
2. Bab II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang memang menjeaskan tentang kajian pustaka bersuber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. Bab III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigm penelitian, metode penelitian, Desain penelitian, sumber penelitian pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta pengumpulan data tau bukti untuk di Analisis mengenai Implementasi program *Sustainable Development Goals*(SDGS) dalam mengatasi kemiskinan di Desa Karanganyar Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
4. Bab IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahsan dari data yang diperoleh.
5. Bab V, Penutup. Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.